



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL**
3. NHK : **155731**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.076.472.400**

1. Tanah Seluas 9.832 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HASIL SENDIRI
Rp. 11.798.400
2. Tanah dan Bangunan Seluas 620 m2/42 m2 di KAB / KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 80.240.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/148 m2 di KAB / KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 189.434.000
4. Tanah Seluas 200.000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL
SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/135 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **150.000.000**

1. MOBIL, CHEVROLET AVEO MINIBUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **27.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.533.074.950
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	800.749.745
F. HARTA LAINNYA	Rp.	139.912.822
Sub Total	Rp.	4.727.209.917
III. HUTANG	Rp.	36.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.690.809.917

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.